

7 Fraksi Sorot Pembenahan Aset KKR

Achmad Munandar
Borneo Tribune, *Kubu Raya*

Tujuh Fraksi di DPRD Kabupaten Kubu Raya mengharapkan agar Pemerintah Kubu Raya lebih serius dalam membenahi permasalahan aset kabupaten tersebut untuk menghindari penilaian opini tidak wajar dari

BPK.

"Kami merasa permasalahan aset ini adalah hal yang sudah lama ada, namun sampai sekarang sepertinya Pemkab Kubu Raya kurang serius untuk membenahinya. Sudah dua tahun berturut-turut sejak 2010 dan 2011, permasalahan aset di Kubu Raya belum juga tuntas," kata Ketua Fraksi Demokrat

DPRD Kabupaten Kubu Raya, Bambang Sridadi usai mengikuti sidang paripurna penyampaian LPJK Bupati Kubu Raya tahun 2011 di Sungai Raya, Senin, (24/9).

Menurutnya, Fraksi Demokrat dan enam fraksi lainnya di DPRD Kubu Raya sudah menilai laporan keuangan Kubu Raya sangat baik. Hanya saja karena ada

kendala pada pembenahan aset yang tersangkut di Kabupaten Pontianak sebagai kabupaten induk dan masalah kerja sama dengan PLN, Kubu Raya selalu mendapatkan penilaian tidak wajar.

Ia menjelaskan, untuk Kabupaten Kubu Raya, walaupun telah melakukan upaya perbaikan secara bertahap, hasil pemeriksaan

BPK RI mencatat pengecualian yaitu pada Dinas Kesehatan terdapat selisih nilai persediaan obat sebesar Rp283.424.775,00 antara neraca dibandingkan dengan saldo akhir di gudang farmasi dan Puskesmas.

Sementara itu, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Nelly Leony menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sampai saat ini juga belum mengakui penyertaan modal pada PDAM Tirta Raya dan termasuk di dalamnya hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kubu Raya sebesar Rp20.667.780.000,00 yang belum jelas statusnya.

"Hal itu yang mengakibatkan sampai saat ini, penilaian pengelolaan keuangan dan aset daerah Kubu Raya selalu mendapat penilaian buruk.

Makanya kami menyarankan agar Pemkab Kubu Raya agar bisa lebih serius dalam membenahi permasalahan aset ini," katanya.

Pihaknya menyarankan agar Pemkab Kubu Raya bisa menggandeng pihak ketiga untuk membantu pendataan aset dan memperbaiki pengelolaan keuangannya. "Jika memang perlu, tidak ada salahnya jika menggunakan jasa pihak ketiga untuk membenahi permasalahan aset ini," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan pihaknya selama tiga tahun terakhir ini sudah bekerja cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan naiknya peringkat Kubu Raya dalam penilaian Badan Pemeriksa

Keuangan RI Kalimantan Barat, di mana dari hasil pemeriksaan keuangan tahun 2012 mendapatkan penilaian Wajar dengan Pengecualian. "Dua tahun sebelumnya, berturut-turut Kubu Raya mendapatkan penilaian tidak wajar," kata Muda.

Hanya saja, dia mengakui jika masih ada mutasi aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya belum dirinci secara lengkap. Hal itu juga belum didukung bukti-bukti yang memadai serta penyerahan dan inventarisasi aset hibah dari Pemerintah Kabupaten Pontianak belum tuntas. "Makanya ke depan kita akan menuntaskan permasalahan aset ini dengan Pemkab Pontianak," tuturnya. □